

Eksistensi sarekat rakyat Pontianak, 1924-1926

Mohammad Rikaz Prabowo¹

¹Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. Hadari Nawawi Pontianak, Indonesia
Email: m.rikaz.prabowo@fkip.untan.ac.id

Informasi artikel: Naskah diterima: 29/03/2024; Revisi: 02/06/2024; Disetujui: 25/01/2025

Abstrak: Sarekat rakyat Pontianak merupakan organisasi afiliasi PKI tahun 1924 dan hasil gabungan sarekat islam (merah) dan *National Indische Partij*. Penelitian bertujuan mendeskripsikan proses terbentuk, gerakan, dan berakhirnya SR Pontianak (1924-1926). Penelitian menggunakan metode sejarah melalui heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Temuan menunjukkan bahwa vakumnya SI di Kalimantan Barat 1920 mendorong aktivisnya mengembangkan SI merah yang terpengaruh komunis. Berkembang pula NIP berhaluan nasionalisme. Pada November 1924 pengurus SI merah dan NIP sepakat berfusi membentuk sarekat rakyat Pontianak berafiliasi dengan PKI pimpinan Gusti Sulung Lelanang. SR Pontianak menggunakan agitasi dan propaganda melalui penerbitan surat kabar berhaluan kiri. Gunanya menyadarkan rakyat dan sarana kritik terhadap penguasa kolonial. Surat kabar tersebut, yakni warta Borneo (1924), halilintar-Hindia (1924), dan Berani (1925). Organisasi ini juga mendirikan klub debat serta mengirimkan kader ke daerah untuk memperluas pengaruh. Aktivitas SR Pontianak yang dianggap radikal mendorong pemerintah kolonial melakukan pelarangan terbit surat kabar dan hak berserikat. Momentum perlawanan PKI 1926-1927 di Banten dan Sumatera Barat turut mempengaruhi eksistensinya. Langkah preventifnya adalah aparat kolonial menangkap pengurus kemudian diasingkan ke Boven Digul.

Kata kunci: sarekat rakyat; Gusti Sulung Lelanang; Pontianak

Abstract: Sarekat rakyat Pontianak was an organization affiliated with the PKI in 1924 and was the result of the merger between the Red Sarekat Islam and the National Indische Partij. The research aims to describe the formation process, movement, and dissolution of SR Pontianak (1924-1926). The research uses historical methods through heuristics, verification, interpretation, and historiography. The findings show that the vacuum of SI in West Kalimantan in 1920 encouraged its activists to develop the red SI influenced by communism. The NIP, which adhered to nationalism, also developed. In November 1924, the leaders of the red SI and NIP agreed to merge and form the Pontianak People's Union, affiliated with the PKI led by Gusti Sulung Lelanang. SR Pontianak used agitation and propaganda through the publication of leftist newspapers. Its purpose was to awaken the people and serve as a means of criticism against the colonial rulers. The newspapers, namely Warta Borneo (1924), Halilintar-Hindia (1924), and Berani (1925). This organization also established debate clubs and sent cadres to the regions to expand their influence. The activities of SR Pontianak, which were considered radical, prompted the colonial government to ban the publication of newspapers and the right to associate. The momentum of the PKI resistance in 1926-1927 in Banten and West Sumatra also influenced its existence. The preventive measure was for the colonial authorities to arrest the leaders and then exile them to Boven Digul.

Keywords: sarekat rakyat; Gusti Sulung Lelanang; Pontianak

Pendahuluan

Perkembangan politik etis yang bergulir di awal abad ke-20 melalui program edukasinya secara perlahan telah membawa kesadaran kebangsaan pada elit bumiputera yang berhasil mengenyam pendidikan. Kesadaran kebangsaan itu semakin diperkuat karena adanya

kesamaan senasib-sepenanggungan yang hidup dalam belenggu penjajahan sehingga memunculkan rasa persatuan (Siri, 2022). Melalui buku-buku yang dipelajari di bangku sekolah, pemuda elit pribumi mulai membandingkan kondisi tanah air dengan bangsa lain yang bebas mengatur negerinya sendiri. Sembari mulai berkenalan dengan paham-paham besar yang berkembang kala itu seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Munculnya rasa kebangsaan di atas juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi komunikasi seperti telegram dan media cetak khususnya pers bumiputera. Hal ini mempercepat penyebaran ide-ide kebangsaan yang semula terpusat di Pulau Jawa ke seluruh wilayah tanah air. Jaringan pedagang antar pulau juga memegang peranan penting pertukaran informasi lewat interaksi-interaksi dengan penduduk setempat. Hal demikian itu terjadi di pesisir barat Kalimantan yang berpusat di Pontianak sebagai ibukota Keresidenan Borneo Barat.

Pelabuhan Pontianak memiliki posisi yang strategis sebagai pintu masuk ke wilayah ini, memenuhi aktivitas ekspor-impor bagi wilayah sepanjang aliran Sungai Kapuas (Rahmayani & Listiana, 2022). Hal ini dikarenakan letak pelabuhannya agak jauh ke dalam sungai sehingga memiliki fungsi penghubung antara jalan maritim dengan jalan darat. Selain itu pelabuhannya memiliki daya tarik karena terdapat komoditas-komoditas hasil hutan yang diperdagangkan (Nurchayani et al., 1999). Kegiatan pedagang-pedagang antar pulau itu tidak hanya terbatas pada kegiatan jual beli saja. Diantara mereka adalah orang-orang yang paham politik dan mengikuti arus perkembangan yang terjadi di Pulau Jawa. Menyelamkan diri pada perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia melalui Sarekat Islam (SI). Lewat pedagang-pedagang intan dan permata dari Surabaya dan Semarang yang beraktivitas di Ngabang dan memperkenalkan SI. Akhirnya pada tahun 1914 berdirilah cabang SI di ibukota *onderafdeeling* Landak itu dipimpin oleh H. Ibrahim bin Rahmad, H. Umar (sekretaris), dan H. Nasri (bendahara) serta dibantu oleh anggota lainnya seperti Mohammad Hambal (Achmad et al., 1981). Pedagang-pedagang muslim yang telah bergelar haji, merasa kehadiran SI sebagai suatu kekuatan yang telah lama dinanti. Hal ini berawal dari perasaan ketidak senangan dengan sejumlah peraturan dagang yang tidak adil ditambah dengan pemungutan pajak yang tinggi oleh pemerintah kolonial. Sehingga tujuan-tujuan SI yang menggugah perasaan dan menyadarkan persatuan itu, dapat terbina kerjasama dan kerukunan.

SI juga dianggap sebagai suatu gerakan politik bagi pengikutnya karena mengobarkan semangat nasionalisme Hindia (Usman, 2017). Dalam perjalanan, perkembangan SI di Ngabang dapat dikatakan tidak terlalu progresif meskipun mendapatkan pengaruh-pengaruh dari perkembangan SI di Pulau Jawa. Berkembangnya faksi komunisme di dalam tubuh SI sejak tahun 1917, juga turut dirasakan oleh SI di Ngabang. Paham komunisme dinilai memiliki perkembangan yang cepat. Hal ini cerminan dari rendahnya keadaan ekonomi rakyat dan buruknya hubungan antara gerakan politik dan respon pemerintah kolonial. Sejak tahun 1917, *Indische Social Democratic Vereeniging* (ISDV) yang merupakan perkumpulan sosialisme pimpinan Henk Sneevliet berhasil membentuk sel di tubuh SI yang bersimpati pada ajaran itu. Paham ini cepat meraih ketertarikan pemuda karena dipandang sebagai lambang kemoderenan yang berlawanan dengan imperialisme, membawa keadilan sosial, kemakmuran, dan

kemerdekaan bangsa yang terjajah (Suhartono, 2001). Hal ini akhirnya menyebabkan terpecahnya SI, sehingga muncul SI Merah yang menerima ide-ide komunisme dan berpusat di Semarang pimpinan Semaun 1921-1923 (Ahmad & Mahasta, 2020). Kondisi di atas itu juga mempengaruhi cabang SI lain di seluruh Indonesia, termasuk di Ngabang. Para pengurusnya kurang serius membesarkan dan menggerakkan organisasi, sehingga di awal tahun 1920an dapat dikatakan telah vakum. Sisa-sisa kader yang masih memiliki optimisme tinggi, akhirnya mulai menerima ajaran komunisme yang diperkenalkan oleh jurnalis dan pelajar yang telah menyelesaikan studinya di Jawa seperti Gusti Sulung Lelanang (GSL). Dengan menghimpun kembali aktivis-aktivis SI di sekitar Kalimantan Barat yang menurutnya memiliki hasrat yang tinggi dalam pergerakan (Soedarto, 1989). Kemudian di arahkan untuk membangun kembali SI (Merah) dengan perjuangan yang lebih radikal dan progresif serta menerima ide-ide komunisme. Pada tahun 1924, SI Merah ini kemudian berfusi dengan *Nationaal Indische Partij* (NIP) pimpinan Jeranding untuk membentuk Sarekat Rakyat (SR) yang tetap berhaluan kiri. SR adalah organisasi politik yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mengganti istilah SI Merah, dengan semboyan satu benteng, satu tentara, satu front bersama untuk mempertahankan kepentingan rakyat (Hasan, 1988).

Di Kalimantan Barat, SR dipusatkan di Pontianak dengan menggunakan pers sebagai sarana perjuangan berupa agitasi dan propaganda. Meskipun eksistensi SR Pontianak hanya bertahan hingga tahun 1926, akan tetapi keberadaannya memainkan peranan penting dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme di wilayah ini untuk dikaji lebih dalam. Menjadi bukti konkrit bahwa gerakan kiri di era ini tidak hanya berkembang pesat di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Akan tetapi, juga berkembang di Pulau Kalimantan yang belum banyak muncul dalam kajian sejarah di Indonesia. Keberadaan SR Pontianak juga menjadi simbol persatuan di tengah masyarakat karena dibesarkan oleh pemuda-pemuda berbagai kalangan seperti bangsawan kesultanan, haji, maupun bumiputera terpelajar. Golongan dengan apa yang disebut sebagai elit baru ini, mulai dihormati di tengah masyarakat bersaing dengan elit lama karena adanya evolusi modernitas dari masyarakat feodal ke industrial. Akibatnya terjadi pergulatan sikap di kalangan anak-anak bangsawan atau golongan ningrat tersebut, sehingga mereka mulai menolak mengikuti jejak orangtuanya yang mengarahkan untuk menjadi pegawai (baik pada pemerintahan kolonial maupun kesultanan) setelah menyelesaikan pendidikan baratnya. Reaksi anak-anak elit masyarakat itu malahan turut terlibat dalam pembentukan partai atau organisasi politik di Hindia (Dhont, 2005).

Keberadaan SR menjadi pendukung program-program PKI di wilayah-wilayah yang tidak terdapat partai itu karena belum berhasil dibentuk. Oleh sebab itu, tujuan SR secara umum tidak jauh berbeda dengan PKI. Sebagai pembanding, misalnya dalam penelitian Nelisia, Fatimah, dan Fitriasia (2018), berjudul Sarekat Rakyat Padang Panjang 1923-1926, mengungkapkan perkembangan komunisme di wilayah ini tidak dapat dilepaskan dari peran ulama-ulama Sumatera Thawalib yang menjadikan ajaran itu sebagai bagian dari Islam revolusioner serta selaras dengan perintah memerangi pemerintahan yang kafir. Sedangkan Wardani (2016) di penelitiannya yang berjudul Peranan Surat Kabar Soerapati Dalam Perlawanan Intelektual

Pribumi di Jawa Barat Tahun 1923-1925, mengungkapkan peranan surat kabar itu yang tidak hanya sebagai corong propaganda SR Sukabumi untuk mengkebiri SI putih namun juga untuk mengkritik pemerintah kolonial. Berbeda dengan dua penelitian di atas, penelitian ini ingin memamparkan suatu fakta baru dari fenomena berdirinya SR di berbagai tempat. Bahwa SR di Pontianak dibentuk sebagai organisasi baru berdasarkan fusi dari aktivis SI Merah dan kaum nasionalis yang tergabung dalam NIP. Sedangkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, keberadaan SR di daerah lain umumnya berdasarkan perubahan bentuk dan ideologi dari SI ataupun kalangan pemuka agama Islam yang bersimpati pada komunisme. Selain melawan pemerintah kolonial, SR Pontianak juga tampak bersebrangan dengan kalangan aristokrat (kesultanan) yang banyak berdiri di wilayah ini. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk tulisan-tulisan di sejumlah surat kabar yang SR Pontianak kelola. Lebih jauh lagi, penelitian ini kiranya dapat menjadi sebuah pelurusan sejarah. Tokoh-tokoh SR Pontianak yang dibuang ke Boven Digul pada 1927, kerap kali dituliskan di berbagai media massa sebagai aktivis SI. Misalnya dalam *Mimbar Untan* (mimbaruntan.com) berjudul *Riwayat Perjuangan Gusti Sulung Lelanang* (Juniati & Suci, 2018), dan dalam *Kumparan* (kumparan.com) berjudul *Tugu Digulis, Simbol Perjuangan 11 Tokoh Sarekat Islam di Kalbar* (Teri & Mariana, 2019). Penelitian ini menjadi kajian awal membahas secara khusus sepak terjang Sarekat Rakyat Pontianak, dimana selama ini tersebar secara sporadis dan dirasa belum mendalam di penelitian lain.

Tujuan penelitian, yakni memaparkan secara komprehensif perkembangan SR Pontianak dengan dinamikanya sekitar tahun 1924-1926. Untuk itu terlebih dahulu akan disampaikan tentang kondisi pergerakan kebangsaan di Pontianak sebelum tahun 1924 yang berpusat di Pontianak. Dimana sebelum tahun tersebut sebenarnya telah muncul bibit-bibit gerakan kiri lewat aktivis-aktivis SI Merah di daerah ini. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tentang perkembangan SR Pontianak dari tahun 1924-1926 dengan beberapa bentuk perjuangannya, terutama melalui agitasi dan propaganda yang dituangkan dalam organ surat kabarnya. Paparan terakhir menyampaikan sejumlah aktivis SR Pontianak yang ditangkap dan kemudian dibuang ke Boven Digul pada 1927 karena dianggap membahayakan pemerintah kolonial. Penelitian ini dapat mengisi celah kekosongan historiografi era pergerakan nasional di Kalimantan Barat yang dirasa minim dalam membahas sepak terjang kaum kiri. Menyajikan sebuah fakta penting bahwa aktivitas kaum kiri dalam pergerakan nasional era 1920an juga terdapat di Kalimantan. Melengkapi kajian-kajian terkait Perlawanan PKI 1926-1927, yang sejauh ini cukup banyak memfokuskan di sekitar Jawa dan Sumatera Barat.

Metode

Penelitian menggunakan metode sejarah dengan beberapa tahap setelah penentuan topik, yakni pengumpulan sumber-sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran sumber (interpretasi), dan penulisan sejarah (historiografi). Pengambilan data dilakukan antara bulan September-Desember 2023. Dengan berhasil mengumpulkan sejumlah sumber primer dan sumber sekunder yang sebagian besar dalam bentuk tertulis. Sumber-sumber tersebut didapatkan dari layanan Perpustakaan Nasional RI, yang menyediakan sumber primer berupa

surat kabar-surat kabar yang terafiliasi redaksinya dengan gerakan kiri dan SR di Pontianak era pergerakan kebangsaan, seperti *Warta Borneo (1923)*, *Halilintar (1923-1924)*, *Halilintar-Hindia (1924)*, dan *Berani (1925)*. Di luar itu, sumber primer berupa surat kabar sezaman juga didapatkan dari layanan dokumentasi surat kabar Delpher (delpher.nl) yang berbasis di Belanda. Sisanya, surat kabar sezaman lain juga didapatkan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan XII Kalimantan Barat, yang juga menyediakan sumber-sumber sekunder. Seperti hasil kajian atau penelitian baik berupa buku, jurnal, ataupun monograf terkait sejarah gerakan komunisme di era-era awal (1919-1926) secara umum dan pergerakan kebangsaan di Kalimantan Barat secara khusus. Langkah selanjutnya ialah melakukan verifikasi pada sumber, untuk memeriksa keaslian sumber (kritik eksternal), dan kredibilitas sumber (kritik internal). Penelitian ini akan banyak mengandalkan pada sumber tulisan (dokumen) maka untuk menjaga otentisitas, surat kabar-surat kabar lama yang digunakan peneliti diperoleh dari layanan Perpustakaan Nasional RI.

Keterjagaan kredibilitas sumber dilakukan kritik internal, yang menurut Kanumuyoso (2020) dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan sumber sejarah yang lain. Buku perbandingan yang peneliti gunakan untuk memverifikasi kredibilitas surat kabar yang digunakan diantaranya berjudul *Pers dan Pemikiran Intelektual di Borneo Barat Masa Kolonial* karya Listiana, Juniardi, dan Pratama. Buku tersebut memaparkan pers-pers yang berkembang di Borneo Barat dimana memuat ide, gagasan, ataupun muatan pemikiran yang diserap dari partai berhaluan kiri dan termasuk perkembangan di fase awal 1919-1927 (Listiana et al., 2014). Dalam hal ini, perkembangan SR Pontianak juga disajikan cukup lengkap dalam buku tersebut. Memuat fase fusnya bersama NIP dan aktivitas-aktivitasnya, serta pemikiran beberapa tokoh penting SR Pontianak. Proses pemaknaan mensyaratkan wawasan yang cukup tentang topik penelitian yang sedang digarap, sehingga diperlukan proses interpretasi atau penafsiran. Interpretasi merupakan suatu telaah yang digunakan peneliti sejarah untuk dapat membayangkan seperti apa situasi pada zaman peristiwa itu berlangsung, kemudian direkonstruksikan dan dihadirkan kembali kepada khalayak saat ini. Untuk itu penulis menggunakan surat kabar-surat kabar sezaman dan sejumlah sumber yang telah melewati tahap kritik untuk membantu interpretasi.

Peneliti juga memanfaatkan beberapa buku yang penulis anggap cukup penting untuk digunakan dalam membantu tahapan ini. Diantaranya dalam buku *Sebelas Perintis Kemerdekaan Indonesia Dari Kalimantan Barat (1972)*, karya R. Mahmud Susilo Suwignjo yang merupakan eks Digulis. Penggunaan metodologi sejarah menurut Kanumuyoso (2020), menyebabkan adanya pendekatan antara sejarah dengan bidang ilmu-ilmu sosial lainnya. Pengkajian sejarah yang menggunakan metodologi ini lebih mampu melakukan eksplanasi dibandingkan yang membatasi diri hanya pada pengungkapan bagaimana sesuatu terjadi atau menguraikan kejadiannya sebagai narasi. Penelitian menggunakan pendekatan sejarah politik. Abbas (2014) mengungkapkan bahwa sejarah konvensional sendiri sebenarnya identik dengan politik, dimana jalannya sejarah ditentukan adanya kejadian-kejadian politik, peperangan, kegiatan diplomasi, dan tindakan tokoh-tokoh politik. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan ilmu politik

membantu peneliti memperoleh informasi terkait pertumbuhan awal kesadaran nasional di Kalimantan Barat melalui sejumlah tokoh/aktivis politik dari latar belakang Islamisme (SI), nasionalisme (NIP), dan komunisme (SR). Pendekatan sejarah politik dirasa memungkinkan untuk menganalisis perjalanan SR Pontianak yang secara nyata merupakan organisasi politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dan juga berafiliasi di bawah PKI. Miftahuddin (2020) menyebutkan sejarah yang ditulis seyogyanya dapat mencerahkan, oleh karena itu peranan tokoh-tokoh atau perjuangan di daerah dalam menentang kolonialisme perlu diabadikan dalam penulisan sejarah. Tidak hanya terkonsentrasi pada tokoh-tokoh besar sebagai gejala umum yang terjadi secara nasional kala itu. Dalam konteks penelitian ini, SR Pontianak menjadi bagian dari peristiwa lahir dan menyebarnya kekuatan politik kiri dalam pergerakan kebangsaan sekitar era 1920-an. Untuk itu pada proses penulisan dilakukan pendalaman lebih terhadap sumber-sumber yang telah melewati interpretasi, khususnya terhadap hasil kajian yang membahas Perlawanan PKI 1926/1927. Dengan begitu akan diperoleh fakta-fakta komprehensif dan aktual yang membantu peneliti dalam merekonstruksi keberadaan Sarekat Rakyat Pontianak tahun 1924-1926.

Hasil dan Pembahasan

Pergerakan kebangsaan di Pontianak sebelum 1924

Berdirinya Sarekat Rakyat di Pontianak sangat berkaitan dengan dinamika yang terjadi di dalam tubuh Syarikat Islam (SI) di Kalimantan Barat. SI tercatat menjadi organisasi pergerakan nasional pertama yang hadir di wilayah ini sejak 1914 tepatnya di Ngabang, menyusul berdiri pula di kota lain seperti Pontianak. Anggota yang tergabung dalam SI umumnya dari kalangan sadar politik seperti haji, guru, ulama, dan saudagar muslim. Golongan ini tergabung dalam SI berangkat dari rasa solidaritas sesama muslim. Untuk memupuk persaudaraan, dan memperkuat persatuan dalam menghadapi tekanan sosial-ekonomi sebagai akibat dari penjajahan. Akan tetapi, sekitar tahun 1918 gerakan SI di Kalimantan Barat mengalami kemunduran karena pemukanya yang lebih mementingkan urusan pribadi dan usaha dagangnya (Soedarto, 1989). Kemunduran SI di Kalimantan Barat sebenarnya menjadi suatu gejala umum yang tidak sedikit juga terjadi pada cabang-cabang SI di tempat lain. Kemunduran ini juga ditambah dengan perpecahan internal di dalam tubuh SI. Pada tahun 1919, pengaruh ideologi sosialis-komunis telah merasuk ke dalam SI dimana tidak sedikit anggotanya bergabung di *Indische Sociaal Democratische Vereniging* (ISDV). Salah satunya Semaun, ketua SI cabang Semarang. Adanya dua aliran dalam SI ini menjadi awal perpecahan organisasi besar tersebut. Dalam rapat-rapat dan kongres, selalu terjadi perdebatan tentang jalan perjuangan yang tidak pernah mencapai titik temu. Perdebatan itu antara kelompok H.O.S Cokroaminoto (kelompok Islam-kebangsaan) dengan kelompok Semaun (sosialis-demokrasi) (Sudiyo et al., 1997). Semaun sendiri pada Mei 1920 telah menjadi ketua Perserikatan Komunis Hindia (PKH) sebagai penerus ISDV. Perseteruan semakin menjadi, istilah SI Putih dan SI Merah pun muncul. Pada kongres SI ke-6 bulan Desember 1921, Semaun dan pengikutnya dikeluarkan karena adanya disiplin organisasi yang melarang ketergabungan ganda di organisasi politik lain. Pada tahun

1923, SI berubah menjadi Partai Syarikat Islam (PSI) dan diadakan kembali disiplin partai yang lebih ketat (Suhartono, 2001). Sikap SI ini ditanggapi PKH dengan pernyataan bahwa mereka akan menghadapi kubu putih itu. Pada Kongres PKH dan SI-SI Merah yang diadakan di Sukabumi pada 6 Maret 1923, memutuskan bahwa dimana ada SI putih, maka akan dibentuk pula SI merah, dan setiap cabang SI merah mesti didirikan PKH. Setiap cabang-cabang lokal yang masih terdapat SI putih, PKH akan mendirikan cabangnya dan Sarekat Rakyat (SR) yang akan bekerjasama di tempat itu dengan PKH (Wardani, 2016). Sarekat Rakyat ini yang menurut Suhartono (2001), merupakan organisasi yang masih terafiliasi dengan PKH. Keputusan kongres dalam tempo yang tidak terlalu lama, diikuti oleh cabang-cabang SI Merah atau aktivis dan simpatisannya hingga ke luar Jawa. SR sendiri sebenarnya organisasi yang lebih diposisikan sebagai pendukung/simpatisan komunis yang terbuka dan tidak fanatik. Hal ini sebagaimana pemikiran Tan Malaka, bahwa revolusi dimungkinkan terjadi apabila terjalin persatuan antar elemen yang luas.

Gerakan komunis harus menerima atau bekerjasama dengan berbagai kekuatan, apapun agama dan latar belakang masyarakatnya. Surat kabar *Semangat Moeda* bahkan menulis bahwa anggota SR dapat berasal dari berbagai lapisan, profesi, dan keyakinan apapun selama mereka benci terhadap imperialisme dan bersebrangan dengan kolonialisme Belanda (Hongxuan, 2018). Seperti halnya yang terjadi di Kalimantan Barat menjadi wilayah potensial bagi aktivis-aktivis progresif untuk membentuk Sarekat Rakyat (SR). Pasalnya, SI di wilayah ini di tahun 1920 dapat dikatakan telah tidak eksis (Achmad et al, 1981). Hal ini menyusul adanya penangkapan terhadap aktivis-aktivis SI di berbagai daerah oleh aparat kolonial akibat perlawanan SI cabang Cimateme (Garut) pimpinan Haji Hasan pada tahun 1919 (Ayu, 2021). Selain di Cimateme perlawanan yang melibatkan aktivis SI di tahun yang sama juga terjadi di Tolitoli (Sulawesi). Pengaruh dua perlawanan itu diketahui hingga ke Kalimantan Barat, dimana beberapa pengurus SI di Mempawah yang progresif mulai mengadakan persiapan-persiapan untuk melakukan aksi serupa.

Rencana ini terdeteksi oleh aparat, yang berakibat pembekuan aktivitas SI di seluruh Kalimantan Barat pada tahun 1919 (Suwignjo & Mansur, 1972). Sementara itu pemuda yang merupakan aktivis SI Merah yang mengenyam pendidikan di luar pulau juga telah kembali. Mulai mengkonsolidasikan kekuatan dengan menghimpun pemuda-pemuda progresif yang pernah bergabung di SI untuk kemudian membentuk sel baru gerakan kiri dalam Sarekat Rakyat (SR). Selain aktivis-aktivis eks SI, pergerakan politik yang lahir di wilayah ini ialah *Nationale Indische Partij* (NIP) atau Partai Insulinde sebagai kelanjutan dari *Indische Partij*. NIP di Kalimantan Barat terdeteksi mulai hadir pada tahun 1919, bertepatan pembekuan aktivitas SI oleh pemerintah kolonial. Tidak sedikit eks-aktivis SI itu, kemudian memilih bergabung dalam NIP yang berasaskan nasionalisme. Aktivis-aktivis NIP di Pontianak mengelola surat kabar *Borneo Barat Bergerak* (BBB), dimana Gusti Abdul Aziz diketahui sebagai ketua partai tersebut. BBB menjadi corong perjuangan dan pemikiran-pemikiran para aktivisnya yang telah eksis sejak bulan Oktober 1919 (Listiana et al., 2014). Terdapat beberapa aktivis pergerakan kebangsaan yang kiranya perlu mendapatkan perhatian dalam proses pembentukan SR di

Pontianak, misalnya Gusti Sulung Lelanang (GSL) dan H. Rais Abdurrachman. GSL yang masih keturunan bangsawan Kesultanan Landak menempuh pendidikan terakhirnya *Normalschool* Meester Cornelis (Jatinegara) Batavia dan lulus pada tahun 1920. Kemudian ia diangkat menjadi guru sekolah dasar disana hingga 1922. Selama berada di Jakarta itulah GSL bergabung dalam SI Jakarta, namun perlahan-lahan mendapatkan pengaruh marxisme hingga akhirnya ia termasuk dalam bagian SI Merah (Juniardi, 2009). Ya Achmad dkk (1981) menyebutkan GSL pernah mendapatkan pendidikan politik dari beberapa tokoh penting gerakan komunis, diantaranya Alimin (Ketua ISDV/PKH Jakarta) dan Tan Malaka. Sementara H. Rais Abdurrachman selepas tamat dari sekolah dasar di Pontianak, pada tahun 1920 memilih melanjutkan pendidikannya di Batavia. Di kota itu H. Rais bertemu dengan GSL dan menggunakan waktu-waktu di luar sekolah untuk mengasah kemampuannya di bidang jurnalistik. H. Rais yang awalnya juga bergabung dalam SI dan NIP banyak belajar dari beberapa redaktur dan surat kabar terkemuka waktu itu.

Salah satunya di surat kabar *Neratja* yang kala itu dipimpin Parada Harahap dan kemudian mendirikan *Bintang Hindia* (Nurcahyani, 2019). Parada diketahui sebagai salah satu tokoh pers kebangsaan selain Tirta Adhi Soerjo, dimana tulisan-tulisannya terkenal progresif membela nasib rakyat di berbagai surat kabar (Firdauzi, 2019). Selama di Batavia sebagai elit pribumi terdidik dengan gaya hidup kosmopolitan, kalangan ini sering mengikuti kegiatan-kegiatan diskusi di *studieclub*, *soos*, dan sebagainya. Pertemuan-pertemuan itu selalu diliputi pemikiran-pemikiran global yang sedang berkembang, sehingga mempengaruhi cara pandang tentang kondisi tanah air (Ariwibowo, 2019). Hal ini membuat para pemuda semakin tertarik dengan ajaran komunisme hingga akhirnya bergabung dalam SI Merah. Setelah mendapatkan beberapa kali peringatan dari penilik sekolah atas aktivitas politiknya di Jakarta, GSL kemudian dipindahkan untuk mengajar di Singkawang pada tahun 1922 sebagai bentuk hukuman (Suwignjo & Mansur, 1972). Atas kepindahan ini, GSL justru merasa senang dan dianggap sebagai bentuk perizinan Belanda untuk membentuk sel baru gerakan kiri di tanah kelahirannya. Sambil menjadi guru, GSL mulai mengontak tokoh-tokoh pemuda eks-SI yang dianggapnya dapat diajak bekerjasama untuk membangun kembali organisasi perjuangan, termasuk H. Rais yang memilih kembali ke wilayah ini (Juniardi, 2009).

Oleh karena GSL tidak juga menghentikan aktifitas politiknya, ia kembali mendapatkan peringatan dari asisten residen agar hanya fokus pada pekerjaannya saja sebagai guru pemerintah atau akan diberhentikan. Alih-alih ciut pada ancaman tersebut, ia malah memilih berhenti dan kembali ke Ngabang. Di kota kelahirannya itu GSL kemudian beralih profesi menjadi pengusaha pengangkutan sungai yang memiliki sebuah kapal. Usaha ini sebenarnya juga untuk mendukung mobilitas dirinya sebagai aktivis politik karena dapat menjangkau berbagai kota sepanjang daerah aliran Sungai Kapuas (Suwignjo & Mansur, 1972). GSL kemudian semakin mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk keperluan perjuangan. Sehingga memunculkan nama aktivis lain yang berasal dari luar gerakan kiri dalam proses pembentukan SR. Misalnya ketika GSL menjalin hubungan kerjasama dengan pengurus *National Indische Partij* (NIP) atau dikenal pula *Insulinde* setempat yang telah dipimpin oleh Jeranding Abdurrahman pada tahun 1923. Hubungan kerjasama positif yang didasari dengan adanya kesamaan gerakan

dan tujuan untuk mencapai kemajuan rakyat bumiputera ini, berbuah sebuah kesepakatan pada November 1924. Baik aktivis SI Merah dan NIP di wilayah ini sama-sama membentuk Sarekat Rakyat (SR) yang diketuai oleh GSL. Surat kabar *Halilintar-Hindia* tanggal 19 November 1924, menyebutkan SR telah berdiri di Pontianak dan mengajak pemuda-pemuda untuk bangkit dan turut dalam pergerakan kebangsaan (Pranata, 1924). Fusi dua kekuatan politik itu terlihat dari beberapa nama pengurus inti SR yang sama-sama berasal dari aktivis SI Merah dan NIP. Beberapa nama pengurus tersebut yakni Muhammad Hambal, Ahmad Marzuki, Mohammad Sohor, Muhammad Sood, Gusti Situt Mahmud, Gusti Hamzah, Haji Rais, Jeranding Abdurrahman, dan Gusti Johan Idrus (Achmad et al., 1981). Beberapa nama lain juga tercatat terlibat dalam membesarkan SR, antara lain Moestava, Abdul Samad, dan Abdul Halim yang merupakan eks NIP. Sedangkan dari tokoh gerakan kiri, diketahui bahwa SR Pontianak dibantu-didirikan oleh Koesno Goesnoko yang merupakan anggota *Hoofdbestuur* PKI dari Jawa. Terdapat pula empat tokoh PKI lain asal Sumatera Barat yakni Abdul Chalid Salim, Sutan Maulana Anwar, M. Dahlan Sutan Lembaq Tuah, dan M. Sarman Sariban.

Keempat tokoh itu banyak membantu SR dalam menerbitkan surat kabar (Listiana, 2019). Khususnya Abdul Chalid Salim (ACS), merupakan adik dari H. Agus Salim yang termasuk jajaran pengurus *Central* Syarikat Islam dan dikenal piawai dalam dunia jurnalistik. Oleh sebab itu, ia bertindak sebagai staf editorial surat kabar *Halilintar-Hindia* yang menjadi organ penerbitan SR Pontianak (Regita et al., 2022). Keberadaan tokoh-tokoh PKI di atas berperan sebagai mentor bagi aktivis-aktivis SR Pontianak. Sejak awal, pendirian SR memang diproyeksikan untuk menyuplai massa dan mempersiapkan kader potensial agar dapat dilantik sebagai anggota PKI sepenuhnya (Hatama et al., 2022). Pendirian SR juga mendapat dukungan tokoh masyarakat setempat seperti Syarif Muhammad Al Hinduan, Muhammad Mekah, Jacob Salim, dan dr. Agusjam (Listiana, 2019:). Sosok dr. Agusjam sendiri diduga banyak memberikan arahan dan pandangan tentang pergerakan kebangsaan. Sebab menjadi saksi berdirinya Boedi Oetomo (1908) dimana pendirinya dr. Soetomo merupakan rekan kuliahnya (Pranata, 2022). Agusjam kemudian pernah ditempatkan di Kendal salah satu basis kuat SI, dan belakangan dipindahkan ke Ngawi (Sutjiatiningsih, 1983). Wilayah Ngawi sendiri dekat dengan Surakarta yang merupakan basis besar Partai Insulinde (NIP) dengan sepuluh ribu anggota (Muhammad, 2021), sebelum akhirnya dr. Agusjam dipindahkan ke Pontianak pada 1921.

Perkembangan sarekat rakyat Pontianak

Sarekat Rakyat (SR) di wilayah ini yang telah berdiri pada November 1924 memusatkan gerakannya di Pontianak. Meskipun begitu, pengurus SR sebenarnya tidak memiliki sekretariat tetap kecuali alamat redaksi *Halilintar-Hindia* yang organisasi terbitkan yakni di Pasar Hulu Blok 47-R Pontianak. Sejumlah pengurus dan kadernya diketahui berada di luar kota, adapun Pontianak dijadikan sebagai pusat gerakan SR selain didasari sebagai ibukota keresidenan, juga kemudahan sarana transportasi dan komunikasi. Rahmayani dan Listiana (2022), menyebutkan Pontianak di tahun 1920an telah menjadi kota pelabuhan ekspor impor bagi wilayah-wilayah disepanjang aliran Sungai Kapuas, hingga ke kota pesisir seperti Ketapang, Mempawah, dan

Teluk Suak (dekat Singkawang). Secara organisasi SR Pontianak dapat dikatakan berafiliasi dengan PKI yang dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya, bahwa keberadaan Koesno Goesnoko (*Hoofdbestuur* PKI) banyak membantu pendirian organisasi ini. Dalam gerakannya, SR menjadikan agitasi dan propaganda untuk menyuarakan isi dan cita-cita pembebasan rakyat. SR tidak menjadikan agama Islam sebagai dasar perjuangan, namun juga tidak anti terhadap agama. Terlebih pada saat itu dikarenakan pendidikan yang rendah, sebagian besar rakyat masih buta politik sehingga belum memahami secara dalam arti perbedaan ideologi (Suwignjo & Mansur, 1972). Meskipun begitu, SR tidak mempropagandakan anti agama karena akan menyebabkan organisasi tidak diminati atau bahkan dimusuhi rakyat. Itulah mengapa pengurus-pengurus SR banyak diisi oleh tokoh-tokoh muslim seperti yang telah bergelar haji dan kalangan kesultanan. Hal ini secara tidak langsung mendorong simpati rakyat karena melihat tokoh panutannya menerima SR. Masyarakat memandang SR tidak ada ajaran yang mengajak kearah kemurtadan dan memusuhi Islam (Juniardi, 2009). Suwignjo yang merupakan eks digulis juga menyebutkan (1972), bahwa orang-orang Islam yang masuk ke dalam wadah SR merupakan ekspresi perasaan nasionalismenya dan berusaha mengadakan sintesa antara Islam dengan komunisme.

Menerima Islam dan memiliki sejumlah tokoh Islam merupakan sebuah strategi yang dapat menguntungkan PKI maupun SR. Kondisi ini menjadi gejala yang umum dalam membahas perkembangan PKI/SR hampir di seluruh Indonesia sebagai sebuah strategi politik. Misalnya di Surakarta dengan kehadiran Haji Misbach yang dikenal sebagai haji merah, ataupun di Sumatera Barat yang tidak sedikit alumni perguruan Sumatera Thawalib tergabung di dalam PKI/SR disana. Hal yang sama terjadi di Banten, seperti tergabungnya ulama dan kaum intelektual Islam yang karismatik seperti Haji Tubagus Achmad Chatib, Ahmad Bassaif, dan Hasanuddin. Ketergabungan golongan ini berdampak signifikan pada peningkatan jumlah anggota yang masuk ke dalam PKI/SR (Ulumi, 2018). Aktivist SR menggunakan jalur pers (surat kabar) untuk menyuarakan kecaman dan tuntutan kepada pemerintah kolonial akan nasib rakyat, serta mengajak rakyat untuk sadar akan arti kebebasan yang diharapkan akan memunculkan hasrat untuk melawan. Hal ini didukung sejumlah aktivis SR yang memiliki pengalaman cukup banyak pada penerbitan surat kabar kebangsaan seperti H. Rais dan Jeranding. Penerbitan surat kabar ini juga dimaksudkan untuk menyaingi surat kabar yang dikelola resmi oleh pengurus pusat Syarikat Islam yakni *Bandera Islam* (Prayogi & Darutama, 2022).

Penggunaan surat kabar sebagai sarana perjuangan bukanlah hal yang baru. Organisasi Boedi Oetomo yang didirikan pada 1908 juga menggunakan saluran ini untuk menyampaikan kritik atas kondisi ekonomi dan sosial di Hindia Belanda. Elite bumiputera terdidik yang membacanya diajak untuk menyikapi kondisi keterpurukan yang terjadi (Prabowo, 2019), sehingga perlahan memunculkan simpati dan perasaan antikolonialisme. Redaksi juga mengumumkan menerima pengaduan langsung apabila mendapatkan penindasan oleh oknum pegawai dan aparat, dimana redaksi berjanji akan memperjuangkan keluhan-keluhan itu (Anwar, 1924). Didukung dengan sejumlah jurnalis kawakan yang berpengalaman dalam penerbitan pers kebangsaan seperti S.M Anwar, Abdul Chalid Salim, Boullie, Jeranding, dan H. Rais, SR memanfaatkan betul kekuatan pers sebagai sarana propaganda. Pers juga digunakan

untuk menginsyafkan rakyat akan rasa kebangsaan dan kemauan membebaskan diri dari belenggu kolonialisme. Tercatat surat kabar lokal yang berada di bawah pengaruh aktivis kiri yang kemudian terhimpun dalam SR Pontianak antara lain 1) *Halilintar-Hindia* (1923-1924), dengan slogannya '*Suara Rakyat Umum Dari Segala Bangsa dan Agama*'. 2) *Warta Borneo* (1924-1925) dengan slogannya yang berbau propaganda ajaran komunisme yakni '*Satu Buat Semua, Semua Buat Satu*', dan 3) *Berani* (1925) yang memiliki slogan lebih frontal yakni '*Barangsiapa yang benci pada kita ialah musuh kita*'. Ketiga surat kabar ini banyak memuat artikel dan berita-berita yang berhubungan dengan paham komunisme, serta kental akan propaganda tentang bahaya kapitalisme bagi golongan proletar (Listiana et al., 2014). Suara-suara akan masa depan Hindia agar memiliki pemerintahan sendiri juga mulai dimuat dalam surat kabar-surat kabar tersebut. Misalnya dalam surat kabar *Warta Borneo* tanggal 8 November 1924, kepala redaktur Boullie yang merupakan Komisararis SR Pontianak, mengecam Kerajaan Belanda tidak ubahnya seperti negara kolonialis lain semisal Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara itu enggan memberikan status pemerintahan sendiri kepada bangsa yang dijajah (Boullie, 1924).

Pembaca *Warta Borneo*, yang terhormat! Lihatlah, bukankan Filipina, British India, dan Hindia Belanda ketika minta pada yang menguasainya supaya tanah airnya di merdekakan lantas ketiga-tiganya bangsa itu bersahut sabarlah dahulu? Sebab itulah maka di kepala bacaan dari karangan ini ada kami katakan: rupanya bangsa kulit putih memang pandai betul mengeluarkan perkataan sabarlah dahulu.

SR Pontianak juga mengkritik praktik-praktik kerja yang dirasa tidak adil dan memberatkan rakyat seperti *heerendienst*. Dalam praktik *heerendienst* upah tidak wajib diberikan kepada rakyat yang diperintahkan bekerja, karena dianggap sebagai kewajiban melayani dari rakyat kepada pemerintah kolonial atau penguasa lokal sebagai pemberi kerja (Rahmayani, 2019). Dengan begitu, kenyataannya *heerendienst* tidak jauh berbeda dengan kerja rodi dan sering disalahgunakan. Seperti yang terjadi di Mempawah dimana praktik *heerendienst* telah mengakibatkan satu pekerja tewas karena bekerja hingga malam hari. Sedangkan di Pontianak ratusan rakyat harus bekerja di tengah terik matahari untuk membuka lahan demi pertunjukan kapal udara. Hal ini dikritisi SR sebagai pekerjaan yang tidak bermanfaat bagi rakyat dan mubazir. Mengenyampingkan pekerjaan perbaikan jalanan yang jelas lebih dibutuhkan oleh rakyat, dan pertunjukan itu hanya menguntungkan orang Belanda saja (Pranata, 1924). *Halilintar-Hindia* juga menjadi jembatan rakyat dalam menyampaikan keluh kesahnya kepada pemerintah melalui kolom surat pembaca.

SR Pontianak secara nyata juga berusaha menggalang solidaritas antar rakyat lintas pulau atas dasar rasa senasib sepenanggungan sesama insan yang terjajah. Misalnya melalui gerakan pengumpulan derma atau sumbangan kepada masyarakat di Wonosobo yang terkena bencana alam gempa bumi. Pengumpulan derma itu dikoordinir oleh Gusti Hamzah sebagai salah satu pengurus SR Pontianak. Dikabarkan pula sejumlah pihak lain juga turut mengikuti langkah SR Pontianak, seperti perkumpulan masyarakat Jawa *Wiro Bekso Wiromo* (WBW) melalui pertunjukan amal (Pranata, 1924). Masalah perburuhan juga tetap disuarakan SR Pontianak, yang melihat kaum kapitalis semakin berani menghisap tenaga mereka. Oleh sebab itu melalui

surat kabar *Berani*, SR Pontianak mengajar kaum buruh untuk bersatu dengan semakin memperkuat perserikatan buruh (Boullie, 1925). Sesuai namanya, surat kabar *Berani* dalam muatannya memang dikenal sangat berani dan secara terbuka mengecam pihak-pihak yang dianggap sebagai sumber kemelaratan rakyat. Selain memuat tulisan dari redaktur-redaktur, berita, dan surat pembaca, *Berani* juga memuat sajak atau puisi yang menggambarkan cita-cita perjuangan dan kondisi rakyat kecil di Borneo Barat. Golongan bangsawan keraton juga tidak lepas dari muatan berita. *Berani* pernah menyindir panembahan di Silat (*Afdeeling Sintang*) yang melarang rakyat menggunakan pakaian berwarna kuning. Sebabnya warna itu dianggap dikhususkan untuk kalangan bangsawan, bukan rakyat biasa. Hal ini tidak pelak menjadi bahan serangan redaksi, yang menganggap peraturan di Silat merupakan hal yang ganjil dan sebagai bentuk ketakutan kaum feodal disana akan pamornya yang turun (Boullie, 1925). Agar aktivisnya memiliki kemampuan dialektika dan agitasi yang baik, SR Pontianak membentuk klub *Lees Internationale Debating Club* (LIDC).

Klub itu sebenarnya terbuka untuk semua kalangan dan juga difungsikan sebagai taman baca dan mimbar umum. Di kemudian hari pengurusnya dipanggil oleh aparat kolonial dengan tuduhan sebagai perkumpulan komunis. Pemerintah kolonial menganggap LIDC menggunakan nama yang dianggap propagandis dan membahayakan, sehingga diancam akan ditutup apabila tidak melakukan penggantian nama (Boullie, 1925). Apabila ditelisik lebih dalam, klub ini menggunakan frasa '*Internationale*' yang notabene adalah lagu perjuangan kaum kiri. Memasuki tahun 1926, aktivis-aktivis SR Pontianak semakin gencar meluaskan pengaruhnya melalui kegiatan perdagangan. Suwignjo dan Mansur (1972) menyebutkan aktivis SR Pontianak mengusahakan Perseroan *Dagang Melaju*, hilir mudik dengan rute Pontianak hingga ke Ngabang melalui Sungai Landak. Dengan begitu, usaha-usaha dagang yang dilakukan para aktivis sebenarnya juga digunakan sebagai kamufase untuk menginsyafi dan menggalang persatuan rakyat di desa-desa di aliran sungai tersebut. Dengan taktik propaganda demikianlah SR Pontianak semakin dikenal dan dihormati rakyat.

Penangkapan aktivis SR Pontianak

Perjuangan SR Pontianak yang progresif dan anti kooperatif sebenarnya telah membuat organisasi ini masuk dalam pantauan pemerintah kolonial melalui aparatnya. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya tentang *Lees Internationale Debating Club* (LIDC) yang diancam penutupannya pada tahun 1925, sejumlah pengurus SR Pontianak juga silih berganti mendapatkan peringatan hingga diperiksa oleh aparat. Lewat tekanan dari pemerintah kolonial, Panembahan Landak Gusti Abdul Hamid pada 1925 telah memperingatkan GSL untuk menghentikan aktifitas politiknya (Suwignjo & Mansur, 1972). Sebagai gantinya, GSL ditawarkan dengan jabatan tinggi di Kesultanan Landak. Tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh GSL yang sebenarnya anti feodalisme (Juniardi, 2009). Kekhawatiran pemerintah kolonial akan semakin suburnya gerakan kiri, merupakan sebuah fenomena umum pada waktu itu yang terjadi di banyak kota. Para agitator komunis mulai berani melakukan aksi-aksi pengorganisasian pemogokan kepada kaum buruh, rapat-rapat umum, dan pidato-pidato propaganda baik secara

lisan maupun tulisan (Xie, 2018). Melalui senjata agitasi dan propaganda yang diterbitkan pada surat kabar yang PKI dan SR kelola, pemerintah kolonial semakin meradang dan mulai mengambil tindakan tegas. Pada Agustus 1925 dikeluarkan daftar 80 buku-buku dan terbitan berbau komunisme atau yang dianggap radikal serta dilarang untuk dibaca, satu diantaranya adalah surat kabar Berani (Zaalberg, 1925). Dirasa masih belum cukup, pemerintah kolonial pada Desember 1925 juga menyatakan menarik hak berkumpul PKI dan organisasi afliasinya seperti SR. Malahan aturan ini semakin diperkuat pada Mei 1926, mengancam akan menghukum dengan berat siapa saja yang mengekspresikan dengan lisan dan tulisan maupun gambar berisi hasutan berpotensi mengganggu ketertiban umum hingga penggulingan kekuasaan (Batubara, 2022). Pembredelan pers yang dikemas dalam suatu aturan hukum (ordonansi) itu, mendapatkan kritik dari berbagai organisasi politik lain salah satunya oleh Koesoemo Oetoyo dari Boedi Oetomo (Dikawati & Sudrajat, 2017). Pelarangan terbit terhadap surat kabar Berani, berlanjut dengan ditangkapnya H. Rais yang dianggap sebagai tokoh penting surat kabar itu.

Terkena berbagai tuduhan subversif yang dibuat-dibuat oleh aparat, diantaranya telah menghasut rakyat agar melawan pemerintah kolonial. H. Rais kemudian mendekam di penjara setelah menolak saran untuk meminta bantuan kepada Sultan Pontianak agar diberikan amnesti dan dijadikan pegawai tinggi kesultanan (Suwignjo & Mansur, 1972). Penangkapan jurnalis SR Pontianak dan pelarangan terbit surat kabarnya itu, sama sekali tidak mengendorkan semangat juang aktivis lainnya yang masih bebas meskipun hidup di bawah pantauan aparat kolonial. Para aktivisnya tetap melakukan *turne* ke desa-desa sepanjang aliran dan cabang Sungai Kapuas dalam selubung kegiatan dagang. Anggapan bahwa organisasi ini penerus SI dan para aktivisnya yang beragama Islam, mendorong pemimpin-pemimpin tradisional seperti kepala desa dan beberapa bangsawan keraton bersimpati pada aktivitas SR (Soedarto, 1989). Aktivis SR Pontianak terus berusaha menyadarkan rakyat bahwa dirinya sebenarnya sedang terjajah agar berani melancarkan perlawanan. Tanasaldy (2014) sendiri menjelaskan, sistem *indirect rule* yang diterapkan oleh pemerintah kolonial sebagai bentuk penguasaan dengan mempertahankan keberadaan kesultanan, membuat rakyat tidak merasakan sedang dijajah.

Hal ini memunculkan beberapa kebijakan yang sebenarnya memberatkan, misalnya kewajiban *heerendienst*. Oleh karena dianggap menghasut pekerja *heerendienst* pembangunan ruas jalan Landak-Pontianak untuk membuat kerusuhan, sejumlah aktivis SR kembali dijebloskan ke penjara pada Juni 1926. Menariknya beberapa diantara yang ditangkap ialah dari kalangan bangsawan kesultanan bergelar 'gusti' (Mulder, 1926), yang sebenarnya memiliki ikatan kekerabatan dengan kalangan kesultanan. Di lain hal, keseriusan pengurus SR Pontianak yang juga menjadikan Ngabang sebagai cabang gerakan tergolong revolusioner. Terdapat dugaan bahwa aktivis SR Pontianak tengah mempersiapkan perlawanan bersenjata di kota ini. Usaha untuk memperoleh senjata-senjata ini dipercayai kepada Gusti Situt Mahmud yang berencana menyelundupkannya dari Sarawak, wilayah yang ketika itu masih menjadi koloni Inggris (Suwignjo & Mansur, 1972). Adanya rencana melakukan perlawanan bersenjata memang menjadi salah satu agenda PKI yang sebenarnya telah diputuskan lewat sebuah

konferensi rahasia di Prambanan pada 25 Desember 1925. Konferensi yang dihadiri oleh *Hoofdbestuur* PKI yang diketuai Sardjono itu, menerima usulan untuk mengadakan aksi bersama, dimulai dengan pemogokan-pemogokan dan dilanjutkan aksi bersenjata. Rencana perlawanan ini akan melibatkan petani-buruh yang dipersenjatai dan tentara pro-PKI, dengan rencana aksi pada pertengahan tahun 1926 (Latif, 2014). Hasil konferensi kemudian disebarakan ke banyak cabang-cabang PKI di seluruh Hindia untuk turut menyambut dan mengadakan aksi serupa. Tokoh-tokoh *Hoofdbestuur* PKI merasa percaya diri dan yakin gerakan ini akan berhasil karena akan didukung oleh SR yang diperkirakan telah memiliki 100.000 anggota di seluruh Indonesia (Xie, 2021). Akan tetapi, aksi bersama itu baru dapat terlaksana pada 12 November 1926 oleh cabang-cabang PKI di Banten (Mardiyah, 2017). Menyusul pada 1 Januari 1927 oleh cabang PKI di Silungkang (Sawahlunto) yang berkolaborasi dengan Sarekat Rakyat setempat dan Perserikatan Kaum Buruh Tambang (Marzali, 2020). Perlawanan yang dilancarkan PKI itu dengan cepat ditumpas oleh aparat kolonial, seperti di Banten pada 20 November 1926 telah berhasil dilumpuhkan (Xie, 2018).

Aksi tersebut memperoleh kegagalan karena dianggap kurang persiapan dan tanpa koordinasi dengan tokoh pendirinya seperti Semaun dan Darsono yang berada di Uni Soviet (Batubara, 2022). Sebaliknya, kegagalan aksi itu menjadi momentum pemerintah kolonial untuk mengadakan penumpasan besar-besaran terhadap gerakan kiri dan progresif. Aktivis-aktivis politik yang dianggap membahayakan, tidak peduli komunis atau non komunis maupun hanya simpatisan ditangkap di seluruh negeri. Hal ini terlihat bahwa tidak sedikit tokoh organisasi buruh dan pekerja yang sebenarnya tidak tergabung dalam PKI juga turut diamankan. Kartodirdjo (Ba'in, 2011) mengungkapkan akibat aksi PKI 1926-1927 tersebut, kedepannya pergerakan kebangsaan mengalami penindasan oleh pemerintah kolonial dan mengalami kesulitan bergerak. Terbukti hal ini menimpa kalangan-kalangan nasionalis, bahkan yang berada di luar negeri sekalipun seperti Hatta yang ditangkap di Belanda dengan tuduhan bekerja sama dengan Semaun (ketua PKI) (Suhartono, 2001). Dalam kaitannya di Kalimantan Barat, belum diketahui secara pasti sejauh mana keterlibatan SR Pontianak dalam rangkaian aksi bersama PKI di Banten dan Sumatera Barat itu. Tetapi sudah menjadi alasan pembenar bagi aparat kolonial untuk meringkus aktivisnya sebagai usaha preventif. Selain itu, telah sejak lama para aktivis SR masuk dalam daftar orang-orang yang dianggap berbahaya.

Soedarto (1989) sendiri berpendapat, bahwa peristiwa di Banten dan Sumatera Barat itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan pergerakan SR Pontianak. Akan tetapi atas dasar pemerintah kolonial yang tidak senang dengan gerak gerik Gusti Sulung Lelanang (GSL) dan rekan-rekannya itu, maka disusunlah suatu fitnah dan vonis kesalahan yang dibuat-buat kepada SR Pontianak. Satu persatu aktivis mulai dilingkus, GSL sendiri diamankan pada 22 November 1926 di Ngabang. Sedangkan Djeranding Abdurrahman ditangkap di Putussibau ketika hendak meluaskan pengaruh SR hingga ke wilayah hulu Kapuas (Effendy, 1982). Semua aktivis yang dianggap berbahaya kemudian ditahan dan dinterogasi di Penjara Sungai Jawi. Penangkapan para aktivis kiri ini menjadi akhir dari perjuangan SR Pontianak. Tidak ada proses pengadilan yang harus dijalani ataupun sekedar pembelaan diri di depan hakim. Gubernur Jenderal di

Batavia kemudian memutuskan sebagian besar aktivisnya bersalah dan dapat dihukum. Bagi aktivis yang dianggap pemimpin rakyat dan sangat berbahaya, dihukum pembuangan ke Boven Digul. Pada 1 April 1927 lewat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda sejumlah aktivis SR Pontianak dibuang ke Boven Digul, Papua. Adapun nama-nama aktivis SR Pontianak itu antara lain (De Keizer, 1927): 1) Gusti Sulung Lelanang, 26 tahun, guru, ketua, 2) Gusti Djohan Idrus, 20 tahun, petani, wakil ketua, 3) Gusti Situt Mahmud, 29 tahun, buruh, sekretaris dan propagandis, 4) Mohammad Sohor, 30 tahun, petani, anggota-propagandis, 5) Mohammad Sood, 20 tahun, guru, sekretaris-bendahara, 6) Mohammad Hambal, 30 tahun, petani, anggota-propagandis, 7) Ahmad Marzuki, 30 tahun, mantan guru sekolah, ketua SR di Kampung Iilir, Ngabang, 8) Moestava, 35 tahun, mantan administrator dan editor Halilintar, bendahara SR Pontianak dan anggota PKI, 9) Djeranding Abdurrachman, 22 tahun, mantan editor Halilintar dan Berani, sekretaris SR terakhir tinggal di Malapi, Kapuas Hulu, 10) Gusti Hamzah, 31 tahun, pelayan, komisar SR dan anggota PKI, 11) Haji Rais Abdurrahman, 18 tahun, penulis di kantor pajak, sekretaris-bendahara SR.

Kesimpulan

Sarekat rakyat Pontianak merupakan organisasi sayap PKI yang eksis antara tahun 1924-1926 berkat fusi Syarikat Islam merah dengan *National Indische Partij*. SR Pontianak dipimpin Gusti Sulung Lelanang menitikberatkan perjuangan melalui penerbitan pers kebangsaan, yang memuat agitasi dan propaganda berkaitan dengan paham komunisme dan perjuangan kelas. Surat kabar yang diterbitkan seperti *warta Borneo* (1924), *halilintar-Hindia* (1924), dan *Berani* (1925). Pada 1926 pemerintah kolonial menangkap pengurus dan aktivis SR Pontianak sebagai upaya pencegahan menyusul kejadian perlawanan yang dilakukan PKI di Banten pada November 1926. Selain itu SR Pontianak juga dianggap kian berbahaya melalui tulisan dan agitasinya di surat kabar yang dianggap menghasut rakyat untuk melakukan perlawanan. Sebanyak 11 tokoh SR Pontianak mendapatkan hukuman dibuang ke Boven Digul pada 1 April 1927. Temuan ini memberikan penguatan peranan terhadap perjuangan aktivis SR dalam pergerakan bangsa di Kalimantan Barat tahun 1920 an. Tokoh tersebut telah ditetapkan sebagai perintis kemerdekaan. Temuan ini menambah referensi tentang eksistensi SR Pontianak yang selama ini hanya dibahas secara sporadis diberbagai penelitian. Terbuka peluang untuk memperdalam di masa yang datang dengan menekankan aspek figur pemimpin dan pemikiran tokoh aktivis melalui pendekatan sejarah mentalitas. Tentunya dikolaborasi dengan arsip, dokumen atau surat kabar sezaman.

Daftar Pustaka

- Abbas, I. (2014). Memahami Metodologi Sejarah Antara Teori dan Praktek. *Jurnal Etnohistori*, 1(1), 23–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.33387/jeh.v1i1.805>
- Achmad, Y., Rachman, A., Soedarto, & Adhisidharto, W. (1981). *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Ahmad, M. G., & Mahasta, M. A. (2020). Dinamika Sarekat Islam dan Komunis. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(02), 62–67. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.690>
- Anwar, S. M. (1924, January 5). Pambatja Yang Terhormat. *Halilintar*, 4.
- Ariwibowo, G. A. (2019). Perkembangan Budaya Kosmopolitan Di Batavia 1905-1942. *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 3(1), 55–74. <https://doi.org/10.33652/handep.v3i1.66>
- Ayu, V. L. (2021). Peran Raden Panji Sosrokardono Dalam Organisasi Sarekat Islam (1915-1923 M). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ba'in. (2011). Nilai-Nilai Pendidikan Pada Pemberontakan Rakyat Sumatera Barat Pada Awal Tahun 1927. *Paramita: Historical Studies Journal*, 21(2), 191–201.
- Batubara, N. I. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Gerakan Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) 1926-1927. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 1–16. <https://doi.org/10.32734/politeia.v14i1.6360>
- Boullie. (1924, November 8). Sabarlah Daholoe. *Warta Borneo*.
- Boullie. (1925a, July 18). Kaoem Boeroeh Moesti Berani! Berani.
- Boullie. (1925b, July 18). Lees Internationale Debating Club Ditakoeti. Berani.
- Boullie. (1925c, July 18). Pengaroehnja Warna Koening. Berani.
- De Keizer, W. G. (1927, April 6). De Geinterneerden. *De Locomotief*.
- Dhont, F. (2005). Nasionalisme Baru Intelektual Indonesia Tahun 1920-an (N. Prajarto (ed.)). Gadjah Mada University Press.
- Dikawati, R., & Sudrajat, A. (2017). Golongan Tua Menggagas Pergerakan Nasional: Pemikiran R.M.T Koesoemo Oetoyo di Bidang Politik Tahun 1908-1942. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 7(2), 20. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v7i2.1487>
- Effendy, M. (1982). Sejarah Perjuangan Kalimantan Barat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pontianak.
- Firdausi, F. A. (2019). Parada Harahap: Sejarah Hidup si Raja Media Pembela Para Kuli. *Tirto*. <https://tirto.id/parada-harahap-sejarah-hidup-si-raja-media-pembela-para-kuli-dyEt>
- Hasan, M. I. (1988). Studi Tentang Sarekat Islam Merah (Tinjauan Historis). IAIN Sunan Ampel.
- Hatama, D. A. G. P., Anwar, & Batia, L. (2022). Perkembangan Komunisme Di Indonesia Tahun 1914-1927. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO (JPPS-UHO)*, 7(1), 57–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.36709/jpps.v7i1.24>
- Hongxuan, L. (2018). Sickle as Crescent: Islam and Communism in the Netherlands East Indies, 1915-1927. *Studia Islamika*, 25(2), 309–350. <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i2.5675>
- Juniardi, K. (2009). Riwayat Gusti Sulung Lelanang. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak Wilayah Kalimantan.
- Juniati, A., & Suci, B. (2018). Riwayat Perjuangan Gusti Sulung Lelanang. *Mimbar Untan*. <https://mimbaruntan.com/riwayat-perjuangan-gusti-sulung-lelanang/>
- Kanumuyoso, B. (2020). Metode Sejarah. Direktorat PTLK, Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Latif, B. (2014). *Manuskrip Sejarah 45 Tahun PKI (1926-1965)* (Bilven (ed.)). Ultimus.
- Listiana, D. (2019). Indonesia dalam Penciptaan Nasionalisme Borneo: Rasa Kebangsaan Persatoean Anak Borneo dalam Majalah Kesedaran dan Doenia Pemoeda di Kalimantan Barat Tahun 1940. In *Wacana Nasionalisme dalam Pers Kalimantan Barat pada Masa Pergerakan Kebangsaan*. CV. Media Jaya Abadi.
- Listiana, D., Juniardi, K., & Pratama, R. (2014). *Pers dan Pemikiran Intelektual di Borneo Barat Masa Kolonial*. Kepel Press.
- Mardiyah. (2017). *Ulama dan Pergerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Banten Abad ke-20*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Marzali, A. (2020). Pemberontakan Komunis Silungkang 1926–1927 Sebuah Gerakan Islam Revolusioner. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 10(1), 59. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v10i1.394>
- Muhammad, E. (2021). *Sejarah Partai Insulinde 1919, Provokator Buruh dan Petani. Harapan Rakyat*. <https://www.harapanrakyat.com/2021/08/sejarah-partai-insulinde-1919-provokator-buruh-dan-petani/>
- Miftahuddin. (2020). *Metodologi Penelitian Sejarah Lokal*. UNY Press.
- Mulder, H. (1926, June 16). *Onrust in Landak. Het Nieuws Van Den Dag Voor Nederlandsch-Indie*.
- Nelisia, S., Fatimah, S., & Fitriasia, A. (2018). Sarekat Rakyat Padang Panjang 1923-1926. *Science and Environmental Journals for Postgraduate*, 1(1), 63–75. <https://doi.org/10.24036/senjop.v1i1.16>
- Nurchayani, L. (2019). Pemikiran Haji Rais bin Abdoerrachman dan Masa Pergerakan Nasional di Kalimantan Barat (1900–1942). In *Wacana Nasionalisme dalam Pers Kalimantan Barat pada Masa Pergerakan Kebangsaan*. CV. Media Jaya Abadi.
- Nurchayani, L., Sulistyorini, P., & Hasanudin. (1999). *Kota Pontianak Sebagai Bandar Dagang Di Jalur Sutra*. CV. Ilham Bangun Karya.
- Prabowo, R. D. (2019). Pemikiran Modernisasi Ekonomi Bumiputra Dalam Surat Kabar Boedi Oetomo Dan Soeara Moehammadijah Di Hindia Belanda (1920-1928). *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 3(1), 33–54. <https://doi.org/10.33652/handep.v3i1.55>
- Pranata, D. (1924a, November 19). *Apa Ini Kewajiban Rajat? Halilintar-Hindia*.
- Pranata, D. (1924b, November 19). *Kita Berseroe!! Halilintar-Hindia*.
- Pranata, D. (1924c, December 10). *Oentoek Gempa Boemi di Wonosobo. Halilintar-Hindia*.
- Pranata, G. (2022). *Memunculkan Kembali dr. Agoesdjam: Dokter Pribumi Yang Terlupakan*. *National Geographic Indonesia*. <https://nationalgeographic.grid.id/read/133332166/memunculkan-kembali-agoesdjam-dokter-pribumi-yang-terlupakan?page=all>
- Prayogi, A., & Darutama, A. (2022). Sikap Politik Surat Kabar Fadjar Asia: Respon Politis Atas Isu Pergerakan Nasional 1927-1930. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 12(2), 154. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v12i2.9656>

- Rahmayani, A. (2019). Tiga Warna Kemandirian Ekonomi: Akar-Akar Nasionalisme dalam Pers Cetak Kalimantan Barat Tahun 1920-an. In *Wacana Nasionalisme dalam Pers Kalimantan Barat pada Masa Pergerakan Kebangsaan* (pp. 7–42). CV. Media Jaya Abadi.
- Rahmayani, A., & Listiana, D. (2022). Antara “Ide Kemajuan” Kolonial Dan Realitas Lingkungan: Jalan Raya Dalam Pembangunan Prasarana Perhubungan Di Pesisir Barat Kalimantan. *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 6(1), 85–106. <https://doi.org/10.33652/handep.v6i1.205>
- Regita, N. C. E., Herwandi, & Nopriyasan. (2022). Ideology and Political Orientation of Intellectuals from Koto Gadang 1930-1950: A Prosopography. *IHiS (Indonesian Historical Studies)*, 6(2), 116–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ihis.v6i2.15899>
- Siri, H. (2022). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. In Lakeisha.
- Soedarto. (1989). *Naskah Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat 1908-1950*. Pemerintah Daerah Tk. II Kalimantan Barat.
- Sudiyo, Santono, D., Nugroho, A., & Suwardi, E. (1997). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia: Dari Budi Utomo Sampai Dengan Pengakuan Kedaulatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suhartono. (2001). *Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. Pustaka Pelajar.
- Sutjiatiningsih. (1983). *Ny. Djohar Insiyah Suharso, Hasil Karya dan Pengabdiannya*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suwignjo, R. M. S., & Mansur, A. (1972). *Sebelas Perintis Kemerdekaan Indonesia Dari Kalimantan Barat*. Tanpa Penerbit.
- Tanasaldy, T. (2014). *Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia Dayak Politics of West Kalimantan*. KITLV.
- Teri, & Mariana, D. (2019). Tugu Digulis, Simbol Perjuangan 11 Tokoh Sarekat Islam di Kalbar. *Kumparan*. <https://kumparan.com/hipontianak/tugu-digulis-simbol-perjuangan-11-tokoh-sarekat-islam-di-kalbar-1sDzn8FB1x5/full>
- Ulumi, H. F. B. (2018). Magic and the Communist Revolt of 1926 in Banten: a Study on the Script of K.H. Muqri Labuan. *Kawalu: Journal of Local Culture*, 5(1), 220–221. <https://doi.org/10.32678/kawalu.v5i1.1872>
- Usman, I. (2017). Sarekat Islam (SI) Gerakan Pembaruan Politik Islam. *Potret Pemikiran: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam*, 21(1). <https://doi.org/10.30984/pp.v21i1.738>
- Wardani, D. T. (2016). Peranan Surat Kabar Soerapati Dalam Perlawanan Intelektual Pribumi Di Jawa Barat Tahun 1923-1925. *Patanjala*, 8(1), 11. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v8i1.54>
- Xie, K. (2018). The Netherlands East Indies 1926 Communist Revolt Revisited: New Discoveries from Singapore’s Digital Newspaper Archives. In *Chapters on Asia: Selected Papers From The Lee Kong Chian Research Fellowship (2014-2016)* (National L, pp. 267–294). National Library Board Singapore.

Xie, K. (2021). (Un) preparing a revolution: The Comintern in the prelude to the 1926–1927 uprisings in Indonesia (S. Dullin, E. Peyrat-Forestier, Y. R. Lin, & N. Shimazu (eds.)). Routledge.

Zaalberg, F. H. (1925, August 15). Verboden Lectuur. Bataaviasch Nieuwsblad.